PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (17) pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Produk Hukum berbentuk peraturan daerah atau nama lainya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Kepala Badan Kehormatan DPRD dan penyusunan Propemperda sebagai mana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dalam jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda dan skala prioritas rancangan perda pada, ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum sebelum penetapan perda tentang APBD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menyetujui Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Propemperda sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 16 November 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

SUPADI

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	LAMA		NA	Penjelasan atau Keterangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026	Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama (lima)tahunan yang berisi enjabaran dari visi misi dan program Kepala daerah (Bupati) dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional		v	Tahun 2021		Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang untuk periodeTahun 2021 sampai dengan 2026	➢ Bappeda Kabupaten Rembang	Tahun 2021	Bidang Pendalev Bappeda Kabupaten Rembang
2.	Perda	Revisi Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana TataRuangWilayah Kab.Rembang Tahun 2011-2031	Pola Ruang Struktur Ruang Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		v	Tahun 2021	v		➢ DPU TARU ➢ Bappeda Kabupaten Rembang ➢ Dintanpan ➢ Dinas LH ➢ Dinindagkop ➢ Bagian Hukum ➢ Bagian Tapem ➢ OPD lain yang terkait	Tahun 2021	

3.	Perda	PT. Rembang Migas Energi (Perseroda)	Minimal cakupan Perda pendirian perusahaan perseroan daerah *Penamaan perusahaan perseroan daerah * Muatan Anggaran dasar *Kepemilikan Saham *Ketentuan Direksi dan Komisaris *Pembentukan SPI,komite audit dan komite lainnya *Pembentukan anak perusahaan *Perencanaan,operasi onal,dan pelaporan * Penerapan tata kelola perusahaan yang baik		v	Tahun 2021	v		➢ Bagian Perekonomian dan SDA Setda ➢ Bagian Hukum Setda ➢ PT.RME	Tahun 2020	
4.	Perda	PT. Rembang Sejahtera Mandiri (Perseroda)	minimal cakupan Perda pendirian Perusahaan peseroan daerah *penamaan perusahaan perseroan daerah *Muatan Anggaran Dasar *keepemilikan saham *Ketentuan Direksi dan Komisaris * Pembentukan SPI,komite audit dan komite lainnya * Pembentukan anak perusahaan *Perencanaan,operasi onal,dan pelaporan		v	Tahun 2021	v		➢ Bagian Perekonomian dan SDA Setda ➢ Bagian Hukum Setda ➢ PT.RBSJ	Tahun 2020	

			* Penerapan tata kelola perusahaan yang baik.								
5.	Perda	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Rencana pembangunan industri dalam rangka waktu 20 Tahun kedepan Meliputi : Penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan Kabupaten Pengembangan perwilayahan Pembangunan Sumber daya Industri Pembangunan sarana dan prasarana Pemberdayaan industri	v		Tahun 2021	v		➢ Dinindagkop dan UKM ➢ DPRD ➢ Bagian Hukum ➢ Bappeda ➢ DPU TARU ➢ Dinlutkan ➢ Dintanpan ➢ Dinparta ➢ kehutanan	Dalam waktu 1 Tahun	Visi dan misi pembangunan Daerah,serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah Peta Kawasan peruntukan Industri dan peta kawasan industri
6.	Perda	Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahaan dan Permukiman	Pedoman dan Aturan Penyerahan PSU kepada Pemerintah Daerah	v		Tahun 2021	v	Sebagai payung hukum untuk penyerahan Fasum Fasos Dari pengembang kepemerintah Daerah	➢ DPKP ➢ Pengembang Perumahan dan Tim Verifikasu penyerahan PSU sesuai SJ Bupati Rembang Nomor 590/1161/ 2019	Bulan Oktober 2021	
7.	Perda	Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik		v		Tahun 2021	v		➢ Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang	Bulan September 2021	

8.	Perda	PengelolaanKeuangan Daerah	Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	v		Tahun 2021	v		➢ BPPKAD	Tahun 2021	
9.	Perda	Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020	Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020	v		Tahun 2021			➢ BPPKAD	Tahun 2021	
10.	Perda	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	v		Tahun 2021			➢ BPPKAD	Tahun 2021	
11.	Perda	APBD Tahun Tahun Anggaran 2022		v		Tahun 2021			➢ BPPKAD	Tahun 2022	
12.	Perda Inisiatif	Pemberdayaan Dan Perlindungan Penerima Bantuan Sosial		v		Tahun 2021			➢ Bapemperda	Tahun 2021	
13.	Perda Inisiatif	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan		v		Tahun 2021			➢ Bapemperda	Tahun 2021	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

SUPADI